

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas tentang relasi birokrasi dan politik, yang terjadi di Pemerintahan Kota Tasikmalaya, dimana dalam proses rekrutmen atau pengangkatan pejabat ASN eselon II Pemkot Tasikmalaya sendiri masih menggunakan sistem *open bidding* (seleksi terbuka) yang dimana dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian kualifikasi gelar pendidikan dengan jabatan yang akan dipegang karena semua pejabat ASN yang memenuhi persyaratan bisa mengikutinya. Serta Walikota mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang bisa mengakibatkan orang-orang terdekat Walikota bisa terpilih secara subjektif.

Menggunakan teori birokrasi, politisasi birokrasi, dan juga merit sistem sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan secara akademis. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi, lalu metode analisis sendiri menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Dan untuk menguji validitas data menggunakan uji validitas triangulasi sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya, khususnya di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui pihak BKPSDM menunjukkan dalam pelaksanaan rekrutmen atau pengangkatan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu beberapa perbaikan yang harus dilakukan.

Di Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam proses rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masih menggunakan sistem seleksi terbuka, hal tersebut mengakibatkan terjadinya politisasi birokrasi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, indikasi terdapat permainan antara Walikota yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan seorang Pejabat Pimpinan Tinggi yang memilih berdasarkan unsur kedekatan dengan seorang ASN sehingga pemilihannya bersifat subjektif, hal ini berkaitan dengan seorang Walikota yang ingin menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi tersebut agar bisa mendapatkan suara dari para ASN untuk mempertahankan kekuasaan di pemilihan berikutnya. Selanjutnya yaitu berlangsungnya seleksi terbuka dalam kurun waktu yang sangat singkat dalam periode tahun 2021-2022. Dimana dalam waktu yang terbilang singkat itu Walikota baru melakukan empat kali seleksi terbuka yang dilaksanakan dengan berbagai posisi Jabatan Pimpinan Tinggi, dimana hal itu sangat tidak wajar yang mengakibatkan pada kecurigaan baik dari masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara yang ada di Kota Tasikmalaya itu sendiri.

Kata Kunci: Relasi Birokrasi dan Politik, Rekrutmen Pejabat, Seleksi Terbuka, Politisasi Birokrasi

ABSTRACT

This study discusses bureaucratic and political relations, which occur in the Tasikmalaya City Government, where in the recruitment process or appointment of echelon II ASN officials the Tasikmalaya City Government itself still uses an open bidding system which in this case will result in a mismatch of degree qualifications. education with the position to be held because all ASN officials who meet the requirements can follow it. And the Mayor has the prerogative to choose who will occupy the position equivalent to the Head of Service or Agency at the Tasikmalaya City Government level.

Using bureaucratic theory, bureaucratic politicization, and also the merit system as an analytical tool in answering questions that have been formulated academically. The research method used is a qualitative method with a case study approach. In collecting data by means of interviews and documentation, then the analysis method uses the interactive analysis method of Miles and Huberman. And to test the validity of the data using the triangulation of the validity of the source.

The results of this study explain that the Tasikmalaya City Government through the BKPSDM shows that the implementation of recruitment or appointment of high-ranking officials within the Tasikmalaya City Government environment has gone well. However, some improvements need to be made.

In the City Government of Tasikmalaya, the recruitment process for High Leadership Positions to fill the Primary High Leadership Positions still uses an open selection system, this resulted in the politicization of the bureaucracy that occurred in the Tasikmalaya City Government environment, indications that there was a game between the Regional Head or Mayor who had the prerogative right in determining a High Leadership Official who chose based on the element of closeness to an ASN so that the election was subjective, this is related to a Mayor who wants to place his closest people in that position so that he can get votes from ASN to maintain power in the next election. Next is the ongoing open selection in a very short period of time in the 2021-2022 period. Where in that relatively short time the new Mayor made four open selections which were carried out with various High Leadership Positions, where this was very unnatural which resulted in good suspicion from the public including the State Civil Apparatus in the City of Tasikmalaya itself.

Keywords: *Bureaucratic and Political Relations, Official Recruitment, Open Selection, Bureaucratic Politicization*